

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TANAH UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Iqbal Insani Afa Syaripudin
NPP. 29.0662

*Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email : iqbalinsani15@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced related to the Effectiveness of Land Asset Management to Maintain Opinion on Financial Statements at the Financial Management Agency of Bogor Regency, West Java Province. **Purpose:** The purpose of this study was to measure the effectiveness of land asset management to maintain opinion on financial statements in the Bogor Regency Government. **Methods:** The method used in this study is a qualitative research method using a descriptive method through an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The results show that the implementation of land asset management in Bogor Regency is carried out effectively. **Conclusion:** The implementation of land asset management in Bogor Regency is carried out effectively. The obstacles faced by the Bogor Regency BPKAD in managing land assets are that the land asset budget in 2020 is not sufficient so that the payment for land asset acquisition becomes regular, the slowness of certification carried out by the National Land Agency (BPN) so that the bookkeeping does not match the specified target. , and the location of the land is already owned by another party and is recorded as an asset of the Regional Apparatus Organization (OPD) which is the user of the goods.

Keywords: Land Assets, Management Effectiveness, Asset Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami terkait Efektivitas Pengelolaan Aset Tanah untuk Mempertahankan Opini Atas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan aset tanah di Kabupaten Bogor dilaksanakan secara efektif. **Kesimpulan:** Pelaksanaan

pengelolaan aset tanah di Kabupaten Bogor dilaksanakan secara efektif. Hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Bogor dalam pengelolaan aset tanah adalah anggaran aset tanah pada tahun 2020 tidak tercukupi sehingga dalam pembayaran pembebasan aset tanah menjadi secara berkala, lambatnya pensertifikatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membuat pembukuan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, dan lokasi tanah sudah dimiliki oleh pihak lain dan tercatat sebagai aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengguna barang.

Kata Kunci : Aset Tanah, Efektivitas Pengelolaan, Pengelolaan Aset

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan pemerintahannya menganut sistem republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dengan pembagian wilayah secara administratif tersebut Negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang dapat membangun seluruh wilayah secara merata. Sebelum masuk pada era reformasi seperti saat ini, Indonesia dahulu menganut sistem pemerintahan orde baru. Akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya kasus corona virus disease di China. Seperti yang diketahui covid-19 naik setatus menjadi pandemi di seluruh dunia pada awal 2020. Indonesia menyatakan adanya dua kasus pertama covid-19 pada bulan Maret yang menyatakan Indonesia masuk dalam fase pandemi covid-19. Pemerintah membuat tim yaitu satuan tugas atau satgas yang bertugas menangani pandemi covid-19 tersebut. Covid-19 menyebabkan seluruh kegiatan masyarakat terbatas dengan adanya psbb dan ppkm. Dari awal ditemukannya dua kasus covid-19 hingga saat ini Indonesia masih menyatakan darurat covid-19. Satu diantara ketentuan yang dapat dijadikan landasan otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah dapat mewujudkan persama rataan pembangunan dan perkembangan terutama pada bidang ekonomi di Indonesia. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pusat melimpahkan kewengannya kepada pemerintah daerah berupa pengalokasian dana perimbangan dan memberikan hak untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah dari hasil pengembangan potensi daerah. Pemerintah pusat melimpahkan kewengannya kepada pemerintah daerah adalah sebagai wujud desentralisasi fiskal. Meningkatkan kinerja keuangan serta mengelola keuangan daerah adalah tujuan utama desentralisasi fiskal tersebut. Terdapatnya kejelasan dalam manajemen keuangan daerah, keuangan daerah juga menjadi lebih struktural termasuk pada alokasi dana dan pengelolaan aset daerah. Tidak hanya manajemen keuangan, salah satu penyebab dari alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat serta kurang mempertimbangkan dari sisi ekonomi, efektifitas, dan efisiensi adalah kurangnya kualitas perencanaan anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 6, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari beberapa sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

salah satu yang sangat berpotensi adalah pemanfaatan barang milik daerah yang berwujud aset tetap tanah secara optimal. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat ini belum digunakan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya aset yang tidak dikelola dengan baik sehingga menurunkan angka produktifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020, Pemerintah Kabupaten Bogor keenam kalinya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kurang efektivnya pemanfaatan aset daerah yang akan membebani anggaran belanja daerah dan badan pengelola itu sendiri. Jika dilakukan pemeliharaan pasti membutuhkan biaya yang besar maka sementara anggaran pemeliharaan yang dialokasikan oleh pemerintah terbatas, ataupun kemungkinan lain seperti adalah perebutan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pemeliharaan akan sia-sia apabila lahan dan bangunan tersebut tetap dibiarkan terbengkalai. Oleh karena itu, solusi terbaiknya adalah menggeser fungsi lahan dan bangunan tersebut untuk membantu mengoptimalkan peningkatan PAD daerah tersebut. Banyaknya aset daerah atas tanah yang belum bersertifikat menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Bogor dalam perencanaan, panatausahaan, dan pemanfaatan serta pengamana belum berjalan dengan baik. Hal ini apabila ini akan memunculkan masalah kedepannya, terutama menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang akan mengakibatkan penurunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1

Data Nilai Aset Tanah Milik Kabupaten Bogor Tahun 2018 s.d. 2020

No	Tahun	Jumlah Aset Tanah (Petak)	Nilai Aset Tanah
1	2018	5.192	Rp 11.713.554.119.346,40
2	2019	5.791	Rp. 13.535.822.153.652,40
3	2020	5.823	Rp.13.610.318.191.803,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor dan diolah oleh peneliti, 2021.

Menurut tabel diatas tiga tahun terakhir jumlah dan nilai aset tanah bertambah. Saat ini pengelolaan aset tanah di Kabupaten Bogor belum efektif dikarenakan masih banyaknya aset tanah yang belum bersertifikat. Bersumber dari situs merdeka.com (29/01/21), bupati Bogor Ade Yasin menyatakan harus disertifikatkan (aset tanah). Supaya tidak ada konflik di kemudian hari, terjadi saling klaim seperti itu. Kalau sudah selesai, jauh dari masalah sengketa nantinya.

Tabel 2

Data Aset Tanah Kabupaten Bogor Tahun 2021

Jumlah Aset Tanah	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
5.789	1.951	3.874

Sumber : merdeka.com

Berdasarkan tabel di atas menurut berita yang peneliti dapatkan dari salah satu media online *merdeka.com* (23/02/21) bahwa aset tanah Pemerintah Kabupaten Bogor berjumlah 5.789 bidang tanah. Dari sejumlah bidang tanah tersebut hanya 1.951 (33,7%) yang bersertifikat dan tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dengan kata lain masih terdapat 3.874 (66,9%) yang masih belum bersertifikat atau bodong. Hal tersebut menunjukkan masih belum efektifnya pengelolaan aset tetap yang dalam hal ini aset tanah di Kabupaten Bogor. Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara suatu output dan tujuan atau dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat pada output, kebijakan dan prosedur pada organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan itu punya pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Bogor belum efektifnya pengelolaan aset tanah di Kabupaten Bogor diakibatkan oleh adanya beberapa kendala diantaranya masih banyaknya sengketa tanah yang belum selesai antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, kemudian dengan adanya penerapan *Work From Home* (WFH) sehingga terhambatnya koordinasi para pegawai BPKAD dalam melakukan pengelolaan aset tetap yang salah satunya merupakan aset tanah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Syadza Hikmawati Tamsir, 2018 yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian Dalam penelitian ini menyimpulkan pengelolaan aset pada biro pengelolaan barang dan aset daerah provinsi Sulawesi selatan telah berjalan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian kedua, yaitu Evi Noviawati, 2016 yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Hasil penelitian Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Penelitian ketiga yaitu, Arif Kurnia Rahman, 2020 yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Hasil penelitian Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik secara administrasi akan tetapi secara implementasi belum sepenuhnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perbedaan pada penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Syadza Hikmawati Tamsir membahas tentang analisis pengelolaan aset daerah selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Evi Noviawati membahas tentang optimalisasi pengelolaan aset daerah kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arif Kurnia Rahman membahas mengenai analisis pengelolaan barang milik daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada penilaian keefektifitasan pengelolaan aset tetap yang dalam hal ini berupa aset tanah di Kabupaten Bogor pada masa *Covid-19*.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor, mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan aset tanah, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan dengan menggunakan teori efektivitas.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor, menggunakan teori Pengelolaan Aset Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimensi yang digunakan adalah perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan, pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Opini atas laporan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2020 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP merupakan opini audit tertinggi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran. Kabupaten Bogor sudah dapat mempertahankan opini WTP sejak tahun 2015. Menurut bapak Drs. Ade Jaya Munadi, SH., MH, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor dapat mempertahankan opini WTP. Pemerintah Kabupaten Bogor dapat mempertahankan opini WTP sejak lima tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2020.

3.1 Perencanaan Aset Daerah

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan pada kedua peraturan tersebut bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan yang mengembangkan perincian permintaan barang di suatu daerah, menghubungkan pembelian barang di masa lalu dengan kondisi saat ini sebagai dasar tindakan untuk mengembangkan permintaan dimasa mendatang. Perencanaan kebutuhan aset tanah di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pengadaan aset tanah yang dilanjutkan dengan pembangunan bangunan diatas tanah tersebut. Proses perencanaan dengan pembebasan dan pembelian aset tanah kepada masyarakat semua hal yang berkaitan dengan pembayaran dan negosiasi. perencanaan dengan diawali perencanaan kebutuhan dan pembebasan lahan dengan cara melakukan negosiasi dan pembayaran kepada masyarakat. Apabila sudah dilakukan negosiasi dan dokumen tanah tersebut lengkap lalu dibuatkan surat keputusan tentang penatapan tanah tersebut. Surat keputusan tersebut dilayangkan kepada Bupati Kabupaten Bogor untuk ditetapkan menjadi aset Kabupaten Bogor dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.

Gambar 1

Contoh Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH													
PROVINSI			PROVINSI JAWA BARAT										
KABUPATEN/KOTA			Kabupaten Bogor										
URUSAN			UNSUR KEWILAYAHAN										
BIDANG			KECAMATAN										
SKPD			KECAMATAN BABAKAN MADANG										
UNIT													
SUB UNIT													
NO. KODE LOKASI : 12.01.10.14.070105.00000.00000													
No.	Nomor		Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga	Tgl. Buku/ No. BAST/ Tgl. BAST/ ID Penerimaan/ Status Aset	Keterangan
	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.					Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor					
1	1.3.1.01.01.04.001/128900/128900	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000,00	1999	Jl. Raya Babakan Madang Kel/Desa Babakan Madang Kec. Babakan Madang KAB. BOGOR	-	-	Kecamatan Babakan Madang	Pembelian J./Inventaris /Bak	192.000.000	31-12-2012/ / 31-12-1999/ / Aset Tetap	PSU / Gambar : 2/SKPD: 0001. Sekretariat Kecamatan Babakan Madang - 001. Sekretariat Kecamatan Babakan Madang
Jumlah Harga				3000							192.000.000		

Sumber: Bagian Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor

Laporan realisasi anggaran perencanaan aset tanah sudah akurat dan tepat waktu. Realisasi anggaran yang akurat dan tepat waktu adalah salah satu indikator bahwa perencanaan aset tanah sudah efektif. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Riki Indra SE., MA. selaku staff bagian perencanaan aset daerah pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022, menyatakan bahwa realisasi anggaran sudah akurat mencapai 96% dapat dilihat pada realisasi anggaran tahun 2020. Pembuatan anggaran dibuat dengan cermat, akurat dan tepat waktu adalah indikator perencanaan sudah berjalan secara efektif. Hasil penelitian yang peneliti lakukan perencanaan aset tanah di BPKAD Kabupaten Bogor sudah efektif. Berdasarkan uraian jawaban dalam kegiatan wawancara peneliti dengan informan, menunjukkan bahwa pada indikator menentukan kebutuhan aset sudah efektif karena tahap awal perencanaan adalah menentukan perencanaan pengadaan aset tanah. Pada indikator mengevaluasi aset-aset yang telah ada berjalan secara belum efektif karena awal perencanaan yaitu perencanaan pengadaan aset langsung kepada pembebasan ada pembelian tanah. Setelah melakukan pembebasan tanah, BPKAD melakukan negosiasi yaitu menunjukan pada indikator membandingkan antara permintaan dan penawaran sudah berjalan efektif.

3.2 Penatausahaan Aset Daerah

Penatausahaan aset daerah merupakan susunan kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukaan dan pelaporan aset daerah yang dicatat oleh BPKAD oleh kuasa pengguna barang. Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah di Kabupaten Bogor sudah mencapai target.

Table 3**Jumlah Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang Sudah Bersertifikat dan yang Belum Bersertifikat Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah bidang	Presentase	Harga Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Bidang tanah	5.832	100%	Rp.13.610.318.191.803,01
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	bersertifikat	1.599	27%	537.593.929.052,37
3	Belum bersertifikat	4.224	73%	13.072.724.262.750,60

Sumber: Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor

Berdasarkan data aset tanah diatas tanah yang sudah bersertifikat pada tahun anggaran 2020 sebanyak 1599. Pensertifikatan aset tanah dimulai pada tahun anggaran 2020. BPKAD Kabupaten Bogor membuat target dalam satu pensertifikatan aset tanah mencapai 1000 aset. penatausahaan aset tanah di Pemerintah Kabupaten Bogor sudah efektif dapat dilihat dari tiga indikator dua diantaranya sudah efektif pada indikator pembukuan dan inventarisasi aset. Hal tersebut dibuktikan dengan proses pensertifikatan aset tanah sedang dalam proses dan pengecekan langsung ke lapangan. Pada indikator pelaporan dikatakan belum efektif dikarenakan tidak adanya laporan setelah aset tersebut di kuasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor.

3.3 Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Pemanfaatan aset tanah di Kabupaten Bogor terbagi empat bentuk yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Pemanfaatan aset tanah di Kabupaten Bogor digunakan untuk menunjang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya. Pengamanan adalah salah satu hal terpenting dalam pengelolaan aset daerah. BPKAD menyatukan sub bidang pengamanan dan pemanfaatan agar lebih efektif dan efisien. Pengamanan aset tanah secara fisik yang dilakukan BPKAD Kabupaten Bogor sudah mencapai tujuan dengan cara memsangkan patok pada setiap aset tanah dan pada administratif dibuatkan sertifikat untuk menjadi landasan hukum atas aset tanah tersebut. Dalam pengamanan aset tanah BPKAD membuat patok agar dapat mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan pengamanan fisik BPKAD melengkapi dokumen atas aset tanah tersebut. Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyatakan bahwa indikator pemanfaatan dan pengamanan aset tanah di Kabupaten Bogor sudah efektif dikarenakan sudah sesuai prosedur. Pemanfaatan aset tanah digunakan untuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Pengamanan aset tanah juga sudah berjalan sesuai prosedur dengan meletakkan patok pada bidang aset tanah dan melengkapi dokumen atas aset tanah tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan yang penelitian dapat yaitu pada penelitian Syadza Hikmawati Tamsir, 2018 dari penelitian ini yakni metode yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada biro pengelolaan barang dan aset daerah provinsi Sulawesi selatan telah berjalan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Temuan penelitian Evi Noviawati, 2016 dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Dan penelitian Arif Kurnia Rahman, 2020 menggunakan metode penelitian kualitatif serta Analisis Pengelolaan Barang Milik Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik secara administrasi akan tetapi secara implementasi belum sepenuhnya.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas pengelolaan aset tanah. untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan di Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dinyatakan efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam efektivitas pengelolaan aset tanah adalah Anggaran aset tanah pada tahun 2020 tidak tercukupi sehingga dalam pembayaran pembebasan aset tanah menjadi secara berkala, Lambatnya pensertifikatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membuat pembukuan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, Lokasi tanah sudah dimiliki oleh pihak lain dan tercatat sebagai aset OPD pengguna barang. Serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pengelolaan aset tanah, yaitu Melakukan pembayaran secara berkala untuk pembebasan tanah tersebut pada tahun anggaran selanjutnya agar dapat dilakukan pembebasan tersebut, Memindahkan proses pensertifikatan dari awalnya dengan BPN kepada DPKPP untuk memproses pensertifikatan agar dapat mencapai target yang ditentukan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengkoordinasikan kepada OPD terkait sebagai pengguna barang agar dokumen atas tanah tersebut menjadi aset tanah Kabupaten Bogor dan memberikan patok sebagai tanah bahwa aset tersebut milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan efektivitas pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan serta seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asniani & Asriani, W. (2012). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teras.
- Carswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, edisi ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods & Techniques. Second Revised Edition* . New Delhi: New Age International.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* . Jakarta: Erlangga.
- Nitisemito, Alex S. (2008). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* . Bandung: Refika Aditama.
- Patarai, Idris. 2020. *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La Macca.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Prasetyo. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedermayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sinurat, Marja & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2015). *Bagan Akun Standar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali.
- Vanderstoep, S. W., & Johnston, D. D. (2009). *Research Methods for Everyday Life Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. San Fransisco: Jossey-BassSan.
- Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Handinata, A. (2011). Bahan Ajar Manajemen Aset. *STAN*.

Suwanda, D. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. *PPM Manajemen*.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. *BPFE*.

Nazir, M. (Gahlia Indonesia). *Metode Penelitian*. Bogor: 2011.

